

## DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi & Sosial. *Jurnal Litbang*, 17(1),17-34.
- Artayani, K. D. (2020). Tinjauan Kepatuhan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Oleh Bendahara Puskesmas Kediri II Kabupaten Tabanan Tahun 2020. PKN STAN.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Laporan Tahunan Direktur Jenderal Pajak*. Direktorat Jenderal Anggaran.
- Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran. (2021). *Informasi APBN 2021*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nmor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah. Sekretariat Negara.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pambudi, B. L. (2020). Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan dan Pemungutan PPh di Puskesmas Bubutan Kabupaten Purworejo Pada Masa Pandemi Covid-19. PKN STAN.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Republik Indonesia. (2008). Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Setiawan, B., & Fitriandi, P. (2017). *Kupas Tuntas PPh Potput (edisi ke-2)*. Penerbit Salemba Empat.
- Taufiqruohman, H. (2020). Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendahara Puskesmas Babadan Kabupaten Ponorogo Pada Tahun 2020. PKN STAN.